



DETIK-DETIK TERAKHIR PURBAYA JABAT MENKEU

Telepon di Tengah Rapat APBN: “Halo Pak. Iya, siap-siap.”

Sedang membahas RAPBN 2027 di DPD, Senin (14/9/2026), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menerima telepon dan meninggalkan ruang rapat. Beberapa jam kemudian, Suahasil Nazara dilantik menggantikannya. Pemerintah belum mengungkapkan alasan spesifik pergantian tersebut. Pilihan Prabowo terhadap Suahasil juga menarik karena bukan nama yang datang dari luar pemerintahan. Suahasil adalah ekonom dan teknokrat yang telah lama bekerja di Kementerian Keuangan. Ia pernah menjabat Kepala Badan Kebijakan Fiskal dan kemudian Wakil Menteri Keuangan sejak 2019. Kekhawatiran pasar terhadap arah kebijakan fiskal dan ketidakpastian ekonomi pun mencuat. Usai pelantikan Suahasil, IHSG sempat menyentuh level terendah 6.371,39. Namun, menjelang penutupan, indeks berhasil memangkas pelemahan dan kembali ke kisaran 6.500. Sementara, nilai tukar rupiah ditutup melemah 58 poin atau 0,33 persen ke Rp17.669 per dolar AS, dari posisi sebelumnya Rp17.611. Terkait PR Suahasil, dia langsung dihadapkan pada tantangan menjaga kesehatan fiskal, mengoptimalkan penerimaan negara, meningkatkan kualitas belanja, hingga menghadapi tekanan eksternal dari gejolak harga minyak dunia. BACA HAL 11...



SRI MULYANI INDRAWATI

Dilantik: 8 September 2025

Dicopot: 14 September 2026

Masa jabatan: ±1 tahun

LHKPN: Rp39,21 miliar (periode 2025)

Profil: Ekonom; sebelumnya Ketua Dewan Komisier LPS.

Sorotan/kontroversi:

- Kebijakan pajak dan fiskal menjadi sorotan publik
- Menghadapi tekanan terkait efisiensi anggaran.
- Rumah pribadinya dijarah massa dalam gejolak akhir Agustus 2025.

SUAHASIL NAZARA

Dilantik: 14 September 2026

Status: Menjabat

LHKPN: Rp 18,17 miliar (periode 2025, dilaporkan 27 Februari 2026)

Profil: Ekonom/akademisi; mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal dan Wakil Menkeu sejak 2019

PURBAYA YUDHI SADEWA

Dilantik: 8 September 2025

Dicopot: 14 September 2026

Masa jabatan: ±1 tahun

LHKPN: Rp39,21 miliar (periode 2025)

Profil: Ekonom; sebelumnya Ketua Dewan Komisier LPS

Sorotan/kontroversi:

- Gaya komunikasi ekonomi blak-blakan.
- Kebijakan fiskal lebih agresif memicu perdebatan.
- Pernah berdebat terbuka dengan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono soal anggaran.
- Membantah rumor jual-beli jabatan Kemenkeu Rp100 miliar.
- Sejumlah konten yang mengatasnamakan dirinya terbukti hoaks/rekayasa AI



**JEJAK
MENKEU
ERA
PRABOWO**

BAHLIL SOAL ANTREAN BBM MAKASSAR: SHIFTING, MODIFIKASI TANGKI HINGGA PANIC BUYING

Antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Makassar, Sulawesi Selatan, dalam sepekan terakhir memunculkan persoalan lebih luas daripada sekadar panjangnya barisan kendaraan. Warga harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan BBM, sementara pemerintah daerah sampai menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi siswa untuk mengurangi mobilitas. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan antrean tersebut bukan disebabkan oleh kelangkaan stok BBM nasional. Menurut Bahlil, salah satu pemicunya adalah pergeseran atau shifting konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi akibat melebarnya perbedaan harga.

Bahlil menyebut cadangan BBM nasional masih berada di atas standar minimum, yakni sekitar 20 hari. Karena itu, ia mempertanyakan jika antrean panjang disebut sebagai akibat kelangkaan pasokan. "Aku sudah cek, apa ini masalahnya, karena cadangan nasional kita 20 hari. Harusnya enggak logik masa terjadi antre?" kata dia dalam agenda Innovation Technology for Social and Environmental Awards (InTechSea) 2026 di Jakarta, Senin (14/9/2026).

Namun, persoalan di lapangan menunjukkan tekanan terhadap distribusi BBM memang terjadi. "Masalahnya sekarang, adalah banyak orang awalnya tidak memakai subsidi, kemudian shifting ke subsidi, ini karena harganya melonjak. Itulah yang terjadi sebagian di Makassar," ujar Bahlil.

Dilaporkan antrean telah berlangsung hampir di seluruh SPBU Makassar selama sekitar sepekan. Warga mengaku harus menunggu berjam-jam, sementara sejumlah pengecer bahkan menjual BBM dengan harga jauh lebih tinggi.



Pengendara sepeda motor dan truk antre untuk mengisi BBM di SPBU di Makassar. (dok.bbc)

Seorang warga bernama Endang, misalnya, mengaku mengantre sekitar satu setengah jam di SPBU Jalan Perintis Kemerdekaan. Karena harus masuk kantor pukul 07.30 WITA, ia beberapa kali memilih membeli BBM eceran. Harga satu botol sekitar 1,5 liter disebut mencapai Rp30.000-Rp35.000.

"Dikasih naik, satu botol Aqua besar harganya Rp35.000, yang paling murah Rp30.000. Kami pegawai kan uang makannya cuma Rp15.000," ujar Endang dikutip dari BBC News.

Warga lain, Amiruddin, 62 tahun, mengatakan antrean BBM telah berlangsung sekitar sepekan dan berdampak langsung terhadap pekerjaannya. Ia bahkan sempat berpindah SPBU setelah stok di lokasi pertama habis sebelum gilirannya tiba.

"Serba sulit. Bagaimana kita mau mencari nafkah kalau BBM ini (langka), sedangkan yang mau kita pakai kendaraan, butuh bensin," kata Amiruddin.

"Kita kan juga mengantar anak sekolah, mengantar orang rumah ke pasar juga. Dampaknya itu karena tidak ada bensin, bagaimana lagi?"

Konsumsi Peralite Melonjak

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai fenomena shifting tersebut. Ia mengatakan stok BBM di fasilitas penyimpanan Makassar masih mencukupi dan distribusi berjalan normal.

Masalahnya, konsumsi Peralite meningkat cukup signifikan. Konsumsi

yang sebelumnya berada di kisaran 800 kiloliter per hari disebut naik menjadi sekitar 1.300 kiloliter per hari.

"Tapi memang terjadi ini peningkatan konsumsi Peralite yang cukup signifikan di situ, ada shifting, terjadinya shifting di situ, yang tadinya sekitar 800-an kiloliter jadi 1.300-an lah per hari," ujar Dwi.

Lonjakan tersebut, menurut Dwi, terjadi karena sebagian konsumen yang sebelumnya menggunakan BBM nonsubsidi beralih ke BBM subsidi, terutama Peralite dan Solar. Perubahan perilaku konsumsi itu kemudian memberikan tekanan pada distribusi dan pelayanan di SPBU.

ESDM juga menerima laporan mengenai dugaan penimbunan atau pembelian berulang melalui kendaraan yang telah dimodifikasi. Praktik semacam ini dinilai perlu diawasi karena dapat membuat stok di SPBU lebih cepat habis dan berpotensi dijual kembali melalui jalur eceran.

"Nah, ini yang harus diawasi sebenarnya," kata Dwi.

Bahlil bahkan meminta Kepolisian ikut menindak dugaan penyalahgunaan tersebut. Ia mengungkap adanya kendaraan yang disebut telah dimodifikasi sehingga mampu menampung BBM subsidi dalam jumlah sangat besar.

"Dan ternyata Bapak, Ibu semua, saya minta tolong kerja sama sama Kepolisian, itu adalah ada sebagian shifting, tapi jauh lebih dari itu adalah ada mobil-mobil Pajero, mobil-mobil truk, bikin tangki gede, besar, sampai 700 liter 1 ton, isi minyak di situ,"

beber Bahlil.

Menurut dia, praktik tersebut membuat penanganan antrean semakin sulit jika tidak ditindak.

Bahlil juga menyebut adanya indikasi kendaraan sengaja mengantre meski tangkinya belum kosong. Pengisian yang dilakukan hanya berkisar 10-20 liter, tetapi tetap menambah panjang antrean.

"Bahkan ada beberapa indikasi sengaja motor dan mobil itu antre, tangkinya belum kosong sudah antre. Isinya ada yang cuma 15 liter, 10 liter, 20 liter," tandasnya.

ESDM sebelumnya juga menyebut kemungkinan munculnya fenomena serupa di daerah lain apabila shifting konsumsi tidak diantisipasi. Pemerintah meminta Pertamina Patra Niaga memperkuat pengawasan dan distribusi.

Pergeseran konsumsi tersebut tidak bisa dilepaskan dari perubahan harga BBM nonsubsidi. Pertamina melakukan penyesuaian harga sejumlah produk nonsubsidi mulai 1 September 2026.

Pertamax Turbo naik dari Rp18.300 menjadi Rp19.600 per liter. Dexlite naik dari Rp19.700 menjadi Rp23.700 per liter. Sementara Pertamina Dex meningkat dari Rp21.150 menjadi Rp25.200 per liter.

Perbedaan harga yang semakin lebar membuat sebagian pengguna kendaraan memilih BBM subsidi yang harganya lebih rendah.

Fenomena serupa juga pernah terlihat dalam persoalan antrean solar subsidi di sejumlah wilayah Sumatra pada Juli 2026.

Ketika itu, pengamat ekonomi energi UGM Fahmy Radhi mengatakan kenaikan harga BBM nonsubsidi dapat mendorong konsumen beralih ke produk subsidi.

"Sebagai konsumen rasional, dia akan mencari yang lebih murah," ujar Fahmy ketika membahas persoalan tersebut. Di Makassar, Pertamina Patra Niaga menyebut kebutuhan BBM memang meningkat sekitar 10-15 persen pada periode Juni-Agustus 2026. Peningkatan tersebut dikaitkan dengan naiknya aktivitas logistik, semakin lebarnya disparitas harga, serta indikasi peningkatan aktivitas pelangiran. (tun,ktn,ant,bbc/dya)

FAKTA PEMECATAN

Juli 2026 — Sowan ke Jokowi

- Mengunjungi kediaman Jokowi di Solo secara pribadi dan mengunggah pertemuan tersebut di Instagram.

Usai Pertemuan Minta Rehabilitasi Jokowi

- Achmad menyampaikan kepada DPP PDIP soal pertemuannya dengan Jokowi. Ia kemudian ikut mendorong agar status keanggotaan Jokowi di PDIP dipertimbangkan untuk direhabilitasi.

26 Agustus 2026 — Sidang Etik

- Achmad dipanggil Komite Etik dan Disiplin PDIP.
- Sidang dipimpin Sadarestuwati. Ia juga membantah isu rencana pindah ke PSI.

4 September 2026 — Dipecat

- DPP PDIP resmi memberhentikan Achmad dari keanggotaan partai. SK Nomor 105/KPTS/DPP/IX/2026 Ditandatangani Megawati Soekarnoputri dan Hastu Kristiyanto.

ALASAN DALAM SK

- Sowan ke Jokowi dan mendorong rehabilitasi status keanggotaannya dinilai sebagai pembangkangan terhadap keputusan partai.

DPP juga mencatat sejumlah pelanggaran internal lain, antara lain:

- Penyalahgunaan wewenang
- Meminta/menerima uang dengan alasan yang tidak dapat dibuktikan
- Intimidasi terhadap pengurus partai
- Membawa dokumen partai tanpa persetujuan
- Pernah diberhentikan dari jabatan karena pelanggaran AD/ART

Juli 2025

- Achmad pernah melakukan aksi nekat nyaris membakar diri di depan Kantor DPC PDIP Surabaya. Aksi itu terjadi setelah dirinya dicopot dari jabatan struktural DPC PDIP Surabaya. Ia kemudian ditenangkan pihak kepolisian.

ACHMAD HIDAYAT DIPECAT, SK PDIP SINGGUNG PERTEMUAN DENGAN JOKOWI

Pemecatan Achmad Hidayat dari keanggotaan PDIP Perjuangan kembali memunculkan polemik di internal partai. Surat keputusan (SK) yang ditandatangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hastu Kristiyanto mencantumkan terkait kunjungan Achmad ke kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). SK juga mempersoalkan pernyataan Achmad yang mendorong partai mempertimbangkan rehabilitasi status keanggotaan Jokowi.



Kader DPC PDIP Surabaya, Achmad Hidayat saat berkunjung ke kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). (tangapan layar IG: @achmad_hidayat)

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun, menurut Said, sikap tersebut tidak sejalan dengan perilaku Achmad.

"Tapi kelakuannya jauh dari apa yang menjadi concern partai dan instruksi Ibu Mega," ujar Said.

Achmad merupakan kader DPC PDIP Surabaya yang diberhentikan dari keanggotaan partai berdasarkan SK DPP PDIP Nomor 105/KPTS/DPP/IX/2026. Surat itu ditetapkan di Jakarta pada 4 September 2026 dan diterima Achmad pada 9 September.

Pernyataan Said mengenai adanya sejumlah pelanggaran sejalan dengan isi SK yang memuat beberapa alasan pemberhentian Achmad. Dalam dokumen tersebut, Achmad disebut terbukti melakukan tindakan yang melanggar Kode Etik dan Disiplin Anggota Partai.

SK mencantumkan sejumlah tindakan yang dinilai melanggar aturan partai. Di antaranya penyalahgunaan wewenang, meminta dan menerima sejumlah uang dengan alasan yang tidak dapat dibuktikan, tindakan intimidatif terhadap pengurus partai, membawa dokumen partai tanpa persetujuan pengurus, serta pernah dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatan karena tindakan yang melanggar AD/ART partai.

Kunjungan Achmad ke rumah Jokowi juga secara khusus tercantum dalam SK.

DPP PDIP menyebut Achmad melakukan kunjungan ke kediaman Jokowi. Beberapa hari kemudian, Achmad membuat pernyataan agar partai mempertimbangkan rehabilitasi Jokowi sebagai kader PDIP

yang telah dipecat.

Menurut DPP, tindakan tersebut bukan kewenangan Achmad sebagai kader. Sikap itu dinilai sebagai bentuk pembangkangan terhadap keputusan partai karena pemecatan Jokowi disebut telah dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku di PDIP.

DPP kemudian menilai tindakan dan sikap Achmad telah mencederai nama baik, martabat, wibawa, dan kehormatan partai serta berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap PDIP. Pelanggaran tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran berat.

Klaim Hanya Silaturahmi

Achmad membenarkan dirinya bertemu Jokowi di kediamannya di Solo sekitar Juli 2026. Namun, ia mengatakan pertemuan itu merupakan inisiatif pribadi dan tidak dilakukan atas nama partai.

"Betul. Saya ke rumah Jokowi itu kurang lebih bulan Juli ya. Hanya jadi silaturahmi, lalu saya posting di Instagram itu. Nah, tidak lama setelah itu, bulan Agustus ada usulan pemecatan dari DPC Kota Surabaya ke DPP, sehingga saya dipanggil oleh DPP," kata Achmad.

Menurut Achmad, kunjungan itu dilakukan setelah dirinya berziarah ke makam Mbah Hasan Besari di Ponorogo. Ia datang tanpa atribut partai. "Saya pakai pakaian putih netral, atas inisiatif saya sendiri," ujarnya.

Achmad datang bersama sejumlah rekan, termasuk kader senior PDIP dan pihak swasta. Dalam pertemuan itu, ia mengaku sempat berbincang dengan Jokowi mengenai hubungan

kebangsaan dan hubungan mantan presiden tersebut dengan Megawati.

Menurut pengakuan Achmad, Jokowi mengatakan dirinya tidak memiliki masalah dengan Megawati dan suatu saat keduanya akan bertemu.

"Sekalipun ngobrolnya berdua dengan saya, penyampaian (Jokowi) 'Saya tidak ada masalah dengan Ibu Mega, dan suatu saat nanti mesti akan ketemu.' Nah, hanya ngobrol itu aja yang saya ungkapkan ke DPP," tuturnya.

Setelah kunjungan tersebut, persoalan berkembang di internal PDIP. DPC PDIP Surabaya mengusulkan pemecatan Achmad ke DPP. Achmad kemudian dipanggil untuk menjalani sidang Komite Etik dan Disiplin PDIP pada 26 Agustus 2026 yang dipimpin Sadarestuwati.

Dalam sidang tersebut, Achmad mengaku ditanya mengenai kemungkinan adanya langkah politik lain, termasuk isu rencana kepindahannya ke PSI. Ia membantah isu tersebut.

"Sampai saat ini belum ada dan tidak ada pembicaraan perihal itu. Wong kita itu hanya silaturahmi biasa. Lah saya ini loh siapa? Cuma kader biasa, sudah dua tahun digitu-gitakan terus," kata Achmad.

Usai sidang etik, Achmad bersama rekannya menyampaikan tiga poin pernyataan sikap kader. Salah satunya meminta DPP PDIP mempertimbangkan rehabilitasi nama Jokowi sesuai AD/ART partai.

Dua poin lainnya berkaitan dengan pengembalian hak pengurus DPC, PAC hingga ranting yang berjuang dalam pemilu serta pengawalan RUU Perampasan Aset.

Achmad menyatakan menerima keputusan pemecatan tersebut. Ia mengaku tetap berterima kasih kepada PDIP atas kesempatan yang pernah diberikan kepadanya sebagai kader.

"Ya saya menyampaikan terima kasih sudah diberikan kesempatan. Saya bersama almarhum Pak Whid (Adi Sutawidjono) dulu bisa memenangkan Pilkada Eri-Armuji 2 kali, memenangkan Pilgub Bu Risma di Surabaya. Sekalipun sumbangsih saya kecil secara politik di PDI Perjuangan, saya berterima kasih," katanya.

Ia juga menegaskan tetap berpegang pada amanat partai bahwa PDIP merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. (tin,pra,ist,dtc/dya)

Ketua DPD PDIP Jawa Timur Said Abdullah menegaskan keputusan pemecatan tidak dapat disederhanakan sebagai konsekuensi dari pertemuan Achmad dengan Jokowi.

"Oh, ada anggota dari PDI Perjuangan namanya Achmad Hidayat. Dia menyatakan bahwa menurut dia, dia dipecat karena sowan ke Pak Jokowi. Yang terjadi sesungguhnya, terlalu banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Achmad Hidayat yang tidak kami sampaikan ke publik," ujar Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/9/2026).

Menurut Said, persoalan Achmad berkaitan dengan sejumlah tindakan yang dinilai tidak sejalan dengan aturan internal partai. Ia juga menyoroti aktivitas Achmad di media sosial.

Said mengingatkan bahwa Achmad pernah membuat konten yang menyatakan siap mati membela

WARNING BPOM: MBG LEWAT 4 JAM SUDAH BASI

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkapkan persoalan batas waktu pengolahan hingga penyajian sebagai salah satu pemicu utama kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam temuan pengawasan di lapangan, ada makanan yang dimasak pada dini hari tetapi baru dibagikan kepada penerima manfaat sekitar 11 jam kemudian. Ditegaskan, batas aman penyajian paling lama 4 jam setelah matang.

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan makanan siap santap memiliki batas aman penyajian maksimal empat jam setelah matang. Jika melewati rentang tersebut, makanan dinilai sudah masuk kategori basi menurut standar operasional prosedur (SOP) yang diberikan BPOM kepada pelaksana MBG.

"Salah satu penyebabnya misalnya diproduksi jam 01.00 malam, diolah, dimasak, nanti diedarkan, disajikan pada saat jam 12.00 siang. Artinya itu kurang lebih 11 jam. Sementara SOP yang kami berikan kepada ini, satuan pelaksana yang berhubungan itu, jangan lewat 4 jam. Kalau lewat 4 jam, itu hitungan kami itu sudah basi," ujar Taruna di Kantor BPOM, Jakarta Pusat, Senin (14/9/2026).

Menurut Taruna, jeda panjang antara proses memasak dan penyajian meningkatkan risiko penurunan mutu makanan. Makanan yang terlalu lama berada dalam kondisi penyimpanan yang tidak sesuai dapat mengalami perubahan kualitas dan menjadi tempat berkembangnya mikroorganisme atau menghasilkan toksin tertentu.

"Nah, kalau sudah basi, terjadi berbagai macam faktor-faktor. Dan setelah kita lihat pada saat di lapangan, kita ambil sampel dan sebagainya, memang ada yang mengandung berbagai macam aflatoxin, ada dan sebagainya, itu karena proses degradasi dari makanan itu," katanya.

Taruna mengatakan persoalan tersebut bukan semata soal kualitas makanan, melainkan juga kepatuhan terhadap SOP yang telah diberikan kepada satuan pelaksana. Berdasarkan pengecekan petugas BPOM, ketidakpatuhan terhadap tugas pokok dan fungsi dalam SOP menjadi salah satu penyebab tertinggi dalam kasus gangguan kesehatan yang terjadi setelah konsumsi MBG.

"Dari data yang disampaikan oleh petugas kami mengecek kejadiannya, salah satu penyebab tertingginya yaitu tidak dilaksanakannya tupoksi dalam konteks SOP yang telah diberikan oleh Badan POM," tegasnya.

Keracunan Berulang

Pernyataan BPOM muncul ketika kasus dugaan keracunan MBG kembali terjadi di sejumlah daerah. Rentetan kejadian tersebut sebelumnya sudah menimpa ribuan penerima manfaat di berbagai wilayah.

Salah satu kasus besar terjadi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Data Dinas Kesehatan Sumut yang dikutip ANTARA mencatat 361 siswa dari SMA



Negeri 1 Berastagi serta SMA dan SMK Swasta Bersama diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi menu MBG pada 13 Agustus 2026. Sebanyak 270 pasien sempat menjalani rawat inap dan 89 lainnya menjalani rawat jalan.

Kasus Karo kembali menjadi perhatian setelah sejumlah siswa mengalami gangguan kesehatan serius. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 11 September mendatangi sejumlah korban di rumah sakit di Berastagi dan memastikan pemerintah menanggung penanganan medis yang diperlukan. Pemeriksaan sampel makanan untuk mencari penyebab kejadian masih dilakukan.

Kasus serupa juga terjadi di Jawa Timur. Pada awal September, sebanyak 512 orang di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Tanggulangin, Sidoarjo, dilaporkan terdampak dugaan keracunan MBG. BGN kemudian memberikan sanksi suspend berat kepada SPPG Sidoarjo Tanggulangin Kalitengah dan menghentikan aktivitas operasionalnya selama 30 hari.

Rangkaian kasus itu membuat persoalan tata kelola dapur MBG menjadi sorotan. Sebelumnya tercatat sedikitnya tujuh kasus keracunan MBG yang muncul pada awal September 2026 dengan jumlah korban lebih dari 2.000 orang. Kasus tersebut tersebar antara lain di Rembang, Tana Toraja, Agam, hingga Jombang.

Ombudsman RI juga menyoroti pola berulang tersebut. Anggota Ombudsman Fikri Yasin menyebut penanganan kasus harus berfokus pada keselamatan penerima manfaat sekaligus pembedahan tata kelola. Berdasarkan data Perwakilan Ombudsman Sumatera Utara, sepanjang 2026 telah terjadi empat peristiwa keracunan MBG di provinsi itu dengan total 700 korban, terdiri atas 699 siswa dan satu guru.

BPOM merekomendasikan SPPG disuspensi hingga ditutup

Taruna mengatakan BPOM memiliki posisi sebagai pengawas, bukan pelaksana program MBG. Kewenangan operasional terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berada pada Badan Gizi Nasional (BGN).

"Tupoksinya Badan POM sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 115, betul-betul tugas kami adalah pengawas. Di Pasal 24 ayat 2 sampai dengan ayat 9, di situ dipertegas bahwa tugas kami dalam konteks pengawasan, bukan pelaksana," ujar Taruna.

Karena itu, BPOM merekomendasikan BGN memberikan sanksi kepada SPPG yang terbukti tidak mampu memenuhi standar keamanan pangan.

"Jadi, rekomendasi kami yang pertama, tentu bagi SPPG yang tidak mampu menjalankan SOP dengan baik, kami rekomendasikan selain ada yang disuspen, juga ada yang mungkin ditutup. Dan itu yang akan melaksanakan tentu adalah BGN, kami cuma merekomendasikan," kata Taruna.

Langkah tersebut sejalan dengan kebijakan BGN beberapa hari sebelumnya. Pada 7 September, BGN mengumumkan penutupan sementara 1.999 dapur SPPG yang belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) kepada dinas kesehatan setempat. BGN menyatakan kepatuhan terhadap SLHS dan standar sanitasi merupakan syarat mutlak bagi dapur MBG.

Selain itu, Peraturan BGN Nomor 4 Tahun 2026 mengatur bahwa SPPG yang berdasarkan hasil pengawasan terbukti melakukan pelanggaran, mengalami kejadian keracunan makanan, atau terlibat dalam kejadian

DATA KERACUNAN PANGAN DAN SEBARAN

Statistik Kasus:

- **Total Terdampak:** Lebih dari 2.000 siswa pada periode Januari hingga Mei 2026.
- **Tingkat Fatalitas:** 0% (semua kasus tertangani via rawat jalan dan observasi medis lokal).

Sebaran Lokasi Kasus:

- **Jawa Tengah:** Kudus (SMAN 2), Pati, Semarang.
- **Jawa Timur:** Surabaya (SPPG Tembok Dukuh), Malang.
- **Jawa Barat:** Sukabumi, Cianjur, Bogor.

Faktor Penyebab Utama Keracunan (Hasil Uji Lab BGN/Kemenkes):

- Kontaminasi bakteri *Escherichia coli* dan *Staphylococcus* pada bahan baku protein basah.
- Keterlambatan distribusi lebih dari empat jam yang menyebabkan makanan basi.
- Belum optimalnya sterilisasi air di dapur.

luar biasa dapat dikenai pemberhentian sementara produksi dan distribusi MBG, rekomendasi pencabutan SLHS, hingga pemberhentian permanen melalui pemutusan kerja sama.

Masalah waktu bukan satu-satunya aspek yang perlu diawasi. Sistem keamanan pangan MBG mencakup rangkaian panjang mulai dari penerimaan bahan baku, pengolahan, pemasakan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, hingga makanan diterima dan dikonsumsi penerima manfaat.

Karena itu, kesalahan pada satu tahapan dapat memengaruhi keamanan makanan yang akhirnya dikonsumsi ribuan anak sekolah.

BGN sebelumnya menyatakan pengawasan terhadap ribuan SPPG dilakukan sejak dini hari, termasuk proses penerimaan bahan mentah hingga distribusi makanan. Namun, rentetan kejadian keracunan membuat pelaksanaan SOP di lapangan kembali dipertanyakan. BGN juga mengakui sejumlah kasus telah masuk proses hukum, dengan beberapa laporan sudah berada pada tahap penyidikan kepolisian.

Dalam konteks tersebut, persoalan empat jam yang disampaikan BPOM menjadi penting karena menyangkut titik kritis antara makanan selesai dimasak dan dikonsumsi. Semakin panjang jeda tanpa pengendalian suhu dan penyimpanan yang memadai, semakin besar risiko keamanan pangan. (wid,ist,kum/dya)

DATA RINCIAN BIAYA HAJI (2017-2026)

2026:

- Bipih (Dibayar Jemaah): Rp54,19 Juta
- Total BPIH: Rp89,40 Juta

2025:

- Bipih (Dibayar Jemaah): Rp55,40 Juta
- Total BPIH: Rp89,40 Juta

2024:

- Bipih (Dibayar Jemaah): Rp56,04 Juta
- Total BPIH: Rp93,40 Juta

2023:

- Bipih (Dibayar Jemaah): Rp49,81 Juta
- Total BPIH: Rp90,05 Juta

2022:

- Bipih (Dibayar Jemaah): Rp39,89 Juta
- Total BPIH: Rp97,79 Juta

2020 & 2021:

Pemberangkatan ditiadakan akibat pandemi Covid-19

2019:

- Bipih (Dibayar Jemaah): Rp35,23 Juta
- Total BPIH: Rp69,16 Juta

2018:

- Bipih (Dibayar Jemaah): Rp35,24 Juta
- Total BPIH: Rp68,96 Juta

2017:

- Bipih (Dibayar Jemaah): Rp34,89 Juta
- Total BPIH: Rp61,79 Juta



BIAYA HAJI 2027 DITARGETKAN DISEPAKATI PEKAN DEPAN

Pemerintah dan Panitia Kerja (Panja) Haji DPR RI masih menghitung besaran biaya haji 2027. Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf berharap pembahasan tersebut tuntas dalam sepekan sehingga angka yang harus dibayar jemaah dapat segera diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto.



Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf dan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak saat meluncurkan hotline pengaduan 'Bongkar Mafia Haji dan Umrah' pada Senin (14/9/2026). (Dok. Kemenhaj)

(BPIH) sebesar Rp107.340.172,02 per jemaah.

Dalam proposal tersebut, biaya yang dibayarkan langsung jemaah atau Bipih sebesar Rp42.936.068,81, setara 40 persen dari total BPIH. Sementara 60 persen atau Rp64.404.103,21 berasal dari nilai manfaat yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Jika dibandingkan dengan BPIH 2026 sebesar sekitar Rp87,41 juta, usulan BPIH 2027 meningkat sekitar Rp19,93 juta atau 22,8 persen.

Namun, angka Rp107,34 juta tersebut belum otomatis menjadi biaya yang harus dibayar setiap jemaah. Besaran Bipih masih menjadi bagian dari pembahasan pemerintah dan DPR.

Di tengah pembahasan biaya, Irfan mengingatkan penyelenggaraan haji 2027 justru menghadapi tantangan lebih berat dibandingkan musim haji sebelumnya.

Perubahan kebijakan pemerintah Arab Saudi menjadi salah satu faktor utama. Selain itu, terdapat dinamika biaya penyelenggaraan yang harus disesuaikan dengan kondisi terbaru.

"Kadang kita berpikir tahun pertama berat, tahun kedua akan lebih mudah karena kita sudah mengetahui masalahnya. Tetapi 2027 justru menjadi tahun yang lebih berat," ujar Irfan dalam acara peringatan satu tahun Kemenhaj di Jakarta Pusat, Senin (14/9/2026).

Menurut dia, perubahan kebijakan Arab Saudi berdampak terhadap berbagai komponen biaya penyelenggaraan. Kemenhaj kini harus menyesuaikan perencanaan dengan kebijakan baru tersebut, termasuk di tengah situasi geopolitik Timur Tengah.

"Ini menyebabkan kenaikan yang

luar biasa dari biaya-biaya semuanya, termasuk perubahan-perubahan policy dari Kementerian Haji Arab Saudi, kita harus menyesuaikan," katanya.

Sejumlah komponen biaya memang telah mengalami tekanan. Sebelumnya pemerintah menyebut kenaikan biaya penerbangan, harga avtur, akomodasi, transportasi darat, layanan Masyair, serta perubahan standar pelayanan di Arab Saudi menjadi faktor dalam penyusunan BPIH 2027.

Pada Juni 2026, pemerintah juga menyebut Arab Saudi menghapus layanan kategori D sehingga seluruh layanan meningkat ke kategori C. Perubahan standar tersebut ikut berdampak pada biaya pelayanan haji.

Persoalan biaya tidak hanya menyangkut kemampuan calon jemaah membayar Bipih. Penggunaan nilai manfaat dana haji juga menjadi perhatian karena menyangkut keberlanjutan keuangan jemaah yang masih berada dalam masa tunggu.

BPKH sebelumnya mengingatkan agar penetapan BPIH 2027 mempertimbangkan keterjangkauan jemaah yang berangkat, keadilan bagi jemaah yang masih menunggu, prinsip syariah, serta kesehatan keuangan haji dalam jangka panjang.

Per Juli 2026, saldo dana haji tercatat Rp182,34 triliun, naik 5,41 persen secara tahunan dari Rp172,99 triliun pada Juli 2025. Sementara nilai manfaat yang telah diperoleh mencapai Rp7,01 triliun.

Namun, kebutuhan nilai manfaat untuk menjalankan skema BPIH 2027 yang diusulkan pemerintah cukup besar.

Dengan kuota 203.320 jemaah, skema BPIH Rp107,34 juta dengan

komposisi 40 persen Bipih dan 60 persen nilai manfaat membutuhkan nilai manfaat sekitar Rp12,98 triliun. Angka tersebut hampir dua kali kebutuhan nilai manfaat BPIH 2026 yang sekitar Rp6,70 triliun.

BPKH memproyeksikan total nilai manfaat 2027 sekitar Rp12,375 triliun. Namun, tidak seluruhnya dapat digunakan untuk membiayai BPIH karena terdapat kebutuhan lain, termasuk operasional BPKH dan distribusi nilai manfaat virtual account jemaah tunggu.

Setelah memperhitungkan berbagai alokasi tersebut, nilai manfaat yang diproyeksikan tersedia untuk BPIH 2027 sekitar Rp6,115 triliun. Dengan demikian, skema 60 persen nilai manfaat berpotensi menimbulkan tekanan terhadap keuangan haji sekitar Rp6,87 triliun.

Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menilai keputusan mengenai biaya haji tidak boleh hanya dilihat dari kemampuan membiayai satu musim keberangkatan.

"Yang perlu kita jaga adalah keseimbangan antara Bipih, nilai manfaat, dan kemampuan keuangan haji. Kita ingin penyelenggaraan haji tahun berjalan dapat terlaksana dengan baik, tetapi pada saat yang sama hak jemaah yang masih menunggu juga harus tetap terlindungi," ujar Fadlul.

BPKH juga mencatat asumsi kurs dalam perhitungan BPIH 2027 sebesar Rp17.500 per dolar AS. Sementara pergerakan kurs pada Juni-Agustus 2026 berada di kisaran Rp17.675 hingga Rp18.197,50 per dolar AS. Perbedaan tersebut menjadi salah satu risiko yang perlu diperhitungkan dalam penetapan biaya.

Kemenhaj membuka kanal pengaduan khusus untuk masyarakat yang menemukan persoalan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Belum lama dibuka, kanal tersebut telah menerima sekitar 13 ribu laporan. Mayoritas aduan berkaitan dengan penyelenggaraan umrah.

Pemerintah menjadikan laporan tersebut sebagai salah satu pintu masuk untuk menelusuri dugaan praktik manipulasi, kecurangan, hingga praktik mafia yang selama ini disebut membayangi ekosistem perhajian.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan keterlibatan publik diperlukan agar pemerintah memperoleh informasi langsung dari jemaah mengenai persoalan yang mereka alami. (gus,iat/dya)

Pemkot Malang Akui Masih Ada Aset Terbengkalai



Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, ditemui usai paripurna penyampaian laporan Banggar DPRD Kota Malang terhadap Ranperda PAK 2026, Senin (14/9/2026). (Santi/Lentera)

MALANG - Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) menjadi sorotan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang dalam pembahasan Ranperda Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2026. Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mengakui masih menemukan sejumlah aset daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Bahkan sebagian di antaranya terbengkalai.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengatakan, optimalisasi BMD menjadi salah satu prioritas yang tengah dibenahi Pemkot Malang. Menurutnya, masih banyak hal yang

perlu dilakukan untuk menata aset daerah, terutama karena jumlah BMD yang dimiliki Pemkot Malang cukup banyak.

"Itu tentunya juga menjadi catatan kami karena pengoptimalan BMD ini menjadi prioritas saya untuk membenahi kembali," ujar Wahyu, ditemui di Kantor DPRD Kota Malang, Senin (14/9/2026).

Dikatakannya, Pemkot Malang saat ini mulai melakukan penataan dan inventarisasi kembali

terhadap BMD. Proses tersebut diperlukan untuk mengetahui kondisi aset sekaligus menyesuaikan data dan pemanfaatannya.

"Ini seiring sejalan. Kami sudah mulai melakukan penataan kembali, menginventarisir," katanya.

Wahyu mengakui proses penataan BMD tidak dapat dilakukan secara cepat. Selain membutuhkan waktu untuk menelusuri aset satu per satu, Pemkot juga menghadapi keterbatasan anggaran, salah satunya dalam proses sertifikasi aset.

Meski demikian, pihaknya

menegaskan, Pemkot Malang telah berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan untuk mendorong penyelesaian sertifikasi BMD. Wahyu menyebut koordinasi tersebut mendapat respons positif.

"Kami sudah koordinasi dengan Kantor Pertanahan, dan Kantor Pertanahan merespons dengan baik. Mudah-mudahan terkait BMD-BMD ini nanti bisa selesai, karena asetnya sangat banyak. Harus kami telusuri satu per satu," tuturnya.

Selain persoalan sertifikasi, Pemkot Malang juga tengah menyisir aset-aset yang pemanfaatannya belum optimal. Salah satu yang menjadi perhatian adalah aset berupa prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) di setiap perumahan yang merupakan bagian dari BMD.

Wahyu juga menyebut masih terdapat aset yang selama ini disewakan, tetapi pemanfaatannya belum berjalan sebagaimana mestinya. Dari hasil inventarisasi, Pemkot menemukan adanya izin pemanfaatan aset yang belum ditindaklanjuti.

"Sebagian yang saat ini disewakan ini juga masih banyak aset-aset yang terbengkalai. Karena setelah kami inventarisir, ada beberapa izin-izin yang belum ditindaklanjuti," ungkapnya.

Menurut Wahyu, terdapat pihak

yang sebelumnya telah mengajukan izin untuk memanfaatkan aset milik Pemkot Malang. Namun, setelah pengajuan tersebut, pembangunan yang menjadi bagian dari pemanfaatan aset belum terealisasi sehingga aset justru terlanjar.

"Contoh belum ditindaklanjuti, mereka sudah mengajukan izin pemanfaatan terkait dengan aset milik Pemkot, tetapi belum terbangun, malah terlanjar. Ini yang akan kami tegaskan," tegasnya.

Sementara itu, Juru Bicara Banggar DPRD Kota Malang Eddy Widjanarko mengatakan, pengelolaan BMD menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian Banggar dalam pembahasan Ranperda PAK 2026.

Banggar meminta Pemkot Malang melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) mempercepat proses sertifikasi sekaligus pengamanan BMD. Tak hanya itu, Pemkot juga diminta mengoptimalkan pemanfaatan aset melalui skema sewa maupun kerja sama pemanfaatan. Aset yang memiliki potensi menghasilkan pendapatan daerah diminta menjadi prioritas untuk segera ditindaklanjuti.

Banggar juga menekankan agar potensi penerimaan daerah yang telah teridentifikasi dapat direalisasikan secara optimal pada sisa waktu hingga akhir Tahun Anggaran 2026. (Santi/Dya)

Harga Material Naik, Pemkab Malang Singgung Risiko Perbaikan Jalan Berkurang

MALANG - Kenaikan harga material membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang harus memutar otak agar target perbaikan jalan pada 2026 tetap terjaga.

Sebab, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Kabupaten Malang, Khairul Isnadi Kusuma, mengatakan eskalasi harga minyak dunia memberikan pengaruh terhadap biaya pelaksanaan pekerjaan jalan. Buntutnya, berpotensi mengurangi panjang jalan yang dapat ditangani dengan anggaran yang tersedia.

"Prinsipnya kami sudah melakukan review harga dan segala macam. Kami sudah antisipasi itu," ujar pria yang akrab dengan sapaan Oong tersebut, Senin (14/9/2026).

Menurutnya, pada tahap awal perencanaan di APBD Murni, harga yang digunakan belum memperhitungkan kenaikan harga yang terjadi. Karena itu, ketika terjadi

eskalasi harga minyak dunia, Dinas PU Bina Marga langsung melakukan penyesuaian harga satuan.

Harga tersebut, lanjut Oong, diperbarui secara berkala berdasarkan perkembangan harga minyak dunia yang dipantau setiap pekan.

Setelah harga satuan diperbarui, proses kontrak dan pelaksanaan pekerjaan kemudian dilakukan. Langkah tersebut dilakukan agar tidak terjadi kesenjangan antara harga satuan yang digunakan dalam perencanaan dengan kondisi harga saat pekerjaan dilaksanakan.

"Setelah berkontrak, sudah langsung dieksekusi untuk pekerjaan fisiknya. Sehingga tidak ada gap antara harga satuan lama dengan yang baru," jelasnya.

Oong mengakui, kenaikan harga tetap berpengaruh terhadap panjang jalan yang dapat ditangani apabila hanya mengandalkan anggaran untuk

pekerjaan tertentu.

Ia memberikan gambaran, pekerjaan yang sebelumnya dengan anggaran Rp1 miliar dapat mencakup sekitar 1 kilometer jalan, dengan kenaikan harga saat ini cakupannya dapat menyusut menjadi sekitar 900 meter.

Namun, kekurangan tersebut diupayakan ditutup melalui kegiatan pemeliharaan rutin. "Sisanya misal 100 meter itu kami bisa tutupi dengan pemeliharaan jalan rutin," katanya.

Pemeliharaan rutin tersebut, salah satunya dapat dilakukan menggunakan campuran aspal panas. Dengan skema ini, pihaknya berupaya menjaga agar target panjang jalan yang menjadi sasaran penanganan tidak ikut berkurang akibat kenaikan harga.



Ilustrasi: Salah satu kondisi jalan di Simpang Empat Kepuharjo, Kabupaten Malang. (Santi/Lentera)

"Intinya, panjang jalan jangan sampai targetnya berkurang. Sehingga kalau belanja modalnya tidak cukup, maka kami tutup dengan pemeliharaan rutin melalui belanja rutin," terang Oong. (Santi/Dya)

Tiga orang tewas dan 15 orang lainnya terluka dalam kejadian baku tembak tersebut menjelang pemungutan suara di wilayah otonomi Muslim Bangsamoro (BARMM). (ist.AFP)



PEMILU PERDANA WILAYAH MUSLIM FILIPINA: BAKU TEMBAK TEWASKAN 3 ORANG

Pemungutan suara bersejarah di wilayah otonomi Muslim Bangsamoro, Filipina, dibuka di tengah bayang-bayang kekerasan. Beberapa jam sebelum warga memberikan suara untuk memilih parlemen pertama yang dipilih secara langsung, baku tembak pecah di dekat sebuah tempat pemungutan suara di Kota Cotabato. Sedikitnya tiga orang tewas dan 15 lainnya terluka dalam insiden yang terjadi sesaat sebelum tengah malam, Senin (14/9/2026).

Polisi menyebut bentrokan bermula dari persoalan sederhana yaitu dua kelompok pendukung faksi politik yang bersaing berebut posisi dalam antrean untuk memberikan suara.

Kepala Kepolisian Cotabato Jibin Bongcayao mengatakan perselisihan tersebut terjadi di luar sebuah sekolah yang digunakan sebagai tempat pemungutan suara di ibu kota regional Bangsamoro.

"Itu bermula dari perebutan posisi dalam antrean antara dua kelompok," kata Bongcayao, seperti dikutip AFP.

Menurut dia, persoalan tersebut kemudian berkembang. "Hal itu menyebabkan aksi saling dorong, berkembang menjadi perkelahian, dan akhirnya tembakan meletus di area yang dipenuhi orang," ujarnya.

Kepolisian Regional Bangsamoro membenarkan bahwa korban maupun sejumlah tersangka berada di antara orang-orang yang tengah menunggu untuk memberikan suara. Polisi juga menemukan sejumlah selongsong peluru di lokasi kejadian.

Para korban kemudian dibawa ke rumah sakit. Tiga orang dinyatakan meninggal, sedangkan 15 lainnya menjalani perawatan akibat luka-luka.

Insiden tersebut menunjukkan betapa rentannya proses politik di Bangsamoro, wilayah yang selama puluhan tahun dibayangi konflik bersenjata, kekerasan politik, serta persaingan antarkeluarga berpengaruh.

Namun, kekerasan itu tidak menghentikan pelaksanaan pemilu. Reuters melaporkan pemungutan suara tetap dimulai pada Senin dengan pengamanan ketat. Komisi Pemilihan Umum Filipina atau Comelec juga mengambil alih administrasi Kota Cotabato sebagai langkah pengamanan menyusul insiden penembakan.

Pemilu ini bukan pemilihan biasa. Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM) untuk pertama kalinya memilih anggota parlemen secara langsung. Hampir 2,4 juta pemilih terdaftar memberikan suara untuk memilih 80 anggota parlemen.

Sebanyak 40 kursi diperuntukkan bagi perwakilan partai politik regional, 32 kursi bagi perwakilan daerah pemilihan, dan delapan kursi untuk perwakilan sektoral. Anggota parlemen yang terpilih nantinya akan memilih kepala menteri Bangsamoro dari antara mereka.

Bagi Bangsamoro, pemilu ini menjadi ujian penting bagi transisi dari pemerintahan sementara menuju pemerintahan otonom yang dipilih melalui mekanisme demokratis. BARMM merupakan satu-satunya wilayah di Filipina yang menjalankan sistem pemerintahan parlementer.

Wilayah tersebut mencakup lima provinsi—Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur dan Tawi-Tawi—serta kawasan geografis khusus yang terdiri atas 63 desa di North Cotabato. Pemilu juga

mencakup 32 distrik, tiga kota, 105 munisipalitas dan 2.185 barangay.

Pemilu Tanda Damai

Pemilu pertama Bangsamoro merupakan bagian penting dari proses perdamaian antara pemerintah Filipina dan Moro Islamic Liberation Front (MILF), kelompok bersenjata yang selama puluhan tahun memperjuangkan otonomi bagi masyarakat Muslim di Mindanao selatan.

Proses perdamaian itu mencapai tonggak penting melalui Comprehensive Agreement on the Bangsamoro (CAB) pada 2014.

Kesepakatan tersebut membuka jalan bagi pembentukan BARMM dan memberikan wilayah tersebut kewenangan otonomi yang lebih luas.

BARMM kemudian dibentuk melalui Bangsamoro Organic Law. Proses tersebut menggantikan

Autonomous Region in Muslim Mindanao dengan struktur pemerintahan baru yang memberikan ruang lebih besar bagi pemerintahan sendiri.

Reuters mencatat konflik separatist selama puluhan tahun di kawasan selatan Filipina telah menewaskan lebih dari 120.000 orang. Karena itu, pemilu pertama parlemen Bangsamoro dipandang sebagai ujian apakah kesepakatan damai dapat diterjemahkan menjadi pemerintahan demokratis dan stabil.

"Pemilu ini merupakan tonggak penting dalam proses perdamaian," demikian gambaran umum yang muncul dari berbagai laporan mengenai pemungutan suara tersebut. Tantangannya adalah memastikan bahwa kompetisi politik tidak kembali berubah menjadi kekerasan bersenjata.

Persoalan itu bukan tanpa alasan. Sejumlah bekas anggota MILF kini masuk ke arena politik melalui partai yang berbeda. Pada saat yang sama, politik keluarga dan jaringan kekuasaan lokal tetap kuat di Bangsamoro.

Associated Press mencatat proses demobilisasi mantan kombatan juga belum sepenuhnya selesai. Sekitar 14.000 anggota MILF masih menunggu proses dekomisioning, di tengah persoalan komitmen pemerintah yang belum seluruhnya terpenuhi.

Pemerintah Filipina sudah mengantisipasi risiko kekerasan jauh sebelum hari pemungutan suara. Lebih dari 20.000 personel keamanan dikerahkan ke berbagai lokasi di BARMM.

Jumlah tersebut mencakup personel militer dan kepolisian. PNP sebelumnya menyatakan 9.821 polisi telah ditempatkan untuk mengamankan pusat pemungutan suara, kantor Comelec, fasilitas pemerintah dan sejumlah titik pemeriksaan. Sebanyak 2.120 Quick Reaction Forces juga disiapkan untuk merespons situasi yang membutuhkan penanganan cepat.

Pengamanan diperketat karena sejarah kekerasan politik di Bangsamoro. Pemerintah juga membatalkan larangan membawa senjata selama periode pemilu dan mendirikan berbagai pos pemeriksaan di wilayah tersebut. (gus,rtr,afp,ist/dya)



Antusiasme masyarakat saat pemilihan parlemen pertama Daerah Otonomi Bangsamoro di Muslim Mindanao (BARMM) di Pahamuddin, Cotabato, Filipina, Senin (14/9/2026). (ist.REUTERS)

Influenza A dan B Merebak

Bukan Flu Biasa, Kenali dan Cegah

Keluhan warganet soal flu yang disertai demam, menggigil, nyeri badan hingga membuat tubuh terasa sangat lemas kembali ramai di media sosial. Di tengah keluhan tersebut, dokter mengingatkan masyarakat tidak buru-buru menganggap semua gejala sebagai flu biasa. Influenza A dan B sama-sama sedang ditemukan pada pasien dengan keluhan batuk dan demam.

Data surveilans Kementerian Kesehatan hingga awal September 2026 menunjukkan aktivitas influenza di Indonesia masih berada pada kategori rendah, tetapi sejumlah indikator mengalami kenaikan. Pada minggu ke-35 atau 30 Agustus–5 September, positivity rate influenza naik menjadi 27 persen dari 17 persen pada pekan sebelumnya. Sebelumnya, pada minggu ke-34, dari 119 spesimen yang diperiksa ditemukan 32 kasus positif influenza, terdiri atas empat influenza A (H3N2), 27 A(H1N1)pdm09, dan satu influenza B/Victoria. Kasus A(H3N2) tersebut terdeteksi di 13 provinsi, dengan Jawa Timur dan Kalimantan Selatan masing-masing menyumbang 24 persen dari temuan.

Di Surabaya, dokter spesialis paru dan pernapasan RSUP Surabaya, dr Harman Prayitno, Sp.P, juga melihat peningkatan pasien dengan keluhan serupa. Dalam sepekan terakhir, menurut Harman, cukup banyak pasien datang dengan batuk, demam dan nyeri kepala. Pemeriksaan swab kemudian menunjukkan sebagian pasien positif influenza, baik tipe A maupun B.

"Sejak seminggu terakhir ini, memang banyak merawat pasien dengan gejala2 batuk2, disertai demam dan nyeri kepala," tulis Harman melalui akun Threads pribadinya. "Ketika dicek, hasil swab nya menunjukkan Influenza POSITIF," lanjutnya.

Harman menyebut secara teori influenza A memang cenderung menimbulkan gejala lebih berat dibandingkan influenza B. Namun, perbedaan itu tidak mutlak. Ia pernah menemukan pasien influenza B dengan kondisi berat hingga berkembang menjadi pneumonia.

"Memang secara teori, gejala pada Influenza A lebih berat daripada Influenza B," katanya. "Namun kemarin sempat menjumpai

pasien dengan Influenza B yang gejalanya berat hingga pneumonia," lanjut Harman.

Influenza memang sering disebut "flu", tetapi tidak semua pilek dan batuk merupakan influenza. WHO menjelaskan influenza musiman terutama disebabkan virus influenza A dan B. Gejalanya dapat muncul mendadak berupa demam, menggigil, batuk, biasanya kering, sakit kepala, nyeri otot dan sendi, sakit tenggorokan serta pilek.

Menurut praktisi kesehatan RS Pondok Indah, dr Hastomo Prabowo, MARS, terdapat tiga kelompok influenza yang dikenal menyerang manusia, yakni tipe A, B dan C.

"Dari ketiga tipe tersebut, virus influenza A cenderung menyebabkan penyakit flu yang gejalanya lebih berat dan kerap menjadi penyebab wabah flu musiman, bahkan pandemi global," kata Hastomo kepada Kompas.com beberapa waktu lalu.

Secara ilmiah, CDC saat ini menggolongkan virus influenza menjadi empat tipe, yaitu A, B, C dan D. Influenza A dan B merupakan penyebab utama flu musiman pada manusia. Influenza C umumnya menyebabkan penyakit ringan dan tidak dikenal menyebabkan epidemi, sedangkan influenza D terutama menyerang ternak dan belum diketahui menyebabkan penyakit pada manusia.

Perbedaan penting lainnya ada pada kemampuan virus berubah. Influenza A memiliki sub tipe berdasarkan protein permukaan hemaglutinin (H) dan neuraminidase (N), antara lain A(H1N1) dan A(H3N2).

Apa yang harus dilakukan saat meriang?

Harman menyarankan masyarakat tidak memaksakan diri beraktivitas di luar rumah ketika kondisi tubuh sedang tidak fit.

"Sebaiknya kembali digalakkan gerakan memakai masker di tempat umum.

H i n d a r i kerumunan/keramaian," tulisnya. "Bila

memang sedang tidak fit, sebaiknya stay di rumah saja," pesannya.

Perlu kah langsung PCR?

Tidak setiap orang yang batuk dan demam otomatis membutuhkan PCR. Pemeriksaan influenza dapat dilakukan dengan berbagai metode, tergantung kondisi pasien dan kebutuhan klinis.

CDC menyebut tes influenza dapat berupa rapid influenza diagnostic tests (RIDTs), rapid molecular assays hingga RT-PCR. Tes cepat antigen dapat mendeteksi influenza A dan B, sementara pemeriksaan molekuler memiliki akurasi lebih tinggi. Hasil negatif pada tes cepat juga tidak selalu berarti seseorang pasti bebas influenza.

Karena itu, ketika gejala cukup berat, menetap, atau muncul pada kelompok berisiko tinggi, pemeriksaan oleh tenaga medis lebih tepat dibandingkan membeli obat secara sembarangan.

Cara sederhana mencegah influenza

Pencegahan tidak membutuhkan langkah rumit. Dokter spesialis anak dr Mesty Ariotedjo, Sp.A, MPH, menyebut vaksinasi sebagai salah satu perlindungan utama bagi anak. "Vaksin influenza tahunan mulai usia enam bulan adalah pilar utama untuk mencegah influenza A dan B," ujar Mesty.

Ia mengatakan vaksin tidak h a n y a

membantu menurunkan risiko terkena influenza, tetapi juga dapat mengurangi risiko gejala berat hingga membutuhkan perawatan di rumah sakit.

"Musim 2023–2024, vaksin terbukti menurunkan risiko rawat inap akibat influenza B pada dewasa sebesar sekitar 67 persen di jejaring rumah sakit AS (Amerika Serikat), dan pada anak memberi proteksi bermakna di data CDC," tambahnya.

CDC dan WHO sama-sama menempatkan vaksinasi tahunan sebagai langkah utama untuk mengurangi risiko influenza dan komplikasinya. Vaksin influenza diperbarui secara berkala karena virus terus mengalami perubahan. Perlindungan dari vaksin juga tidak muncul seketika; tubuh membutuhkan waktu sekitar dua minggu untuk membentuk antibodi.

Selain vaksin, Mesty mengingatkan pentingnya kebiasaan sehari-hari. "Kebiasaan cuci tangan, etika batuk, ventilasi yang baik, dan menjaga jarak saat ada yang sakit tetap penting," kata Mesty.

Ia juga mengingatkan orang tua memastikan anak memperoleh tidur, cairan dan nutrisi yang cukup. "Pastikan tidur, minum, asupan nutrisi kalori sesuai kebutuhan individu anak masing-masing," jelasnya. (farist/dya)

Riset 6 Dekade Lalu: 13 November 2026 Disebut Hari Kiamat

Tanggal 13 November 2026 belakangan kembali dikaitkan dengan ramalan kiamat. Klaim itu bukan berasal dari ramalan astrologi atau prediksi paranormal, melainkan dari sebuah penelitian ilmiah yang diterbitkan lebih dari enam dekade lalu.

Penelitian tersebut berjudul *Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026*. Artikel ini diterbitkan dalam jurnal *Science* pada 4 November 1960 oleh tiga peneliti, yakni ahli fisika Austria Heinz von Foerster bersama Patricia M. Mora dan Lawrence W. Amiot. Artikel tersebut dimuat dalam *Science* volume 132, halaman 1291-1295.

Judul penelitian itu memang terdengar seperti prediksi akhir dunia. Namun, isi kajiannya sebenarnya berbicara tentang proyeksi pertumbuhan penduduk menggunakan model matematika. Para peneliti mencoba melihat apa yang akan terjadi jika pola pertumbuhan populasi manusia selama ribuan tahun terus berlangsung tanpa perubahan.

Dari perhitungan tersebut, mereka mendapatkan satu titik waktu pada 13 November 2026. Dalam model yang digunakan, jumlah manusia akan terus meningkat dengan laju yang semakin cepat hingga secara matematis mendekati tak terhingga.

Dengan kata lain, tanggal tersebut bukan hasil perhitungan kapan Bumi akan hancur akibat bencana tertentu. Tidak ada prediksi mengenai asteroid, perang nuklir, wabah penyakit, atau fenomena astronomi yang akan mengakhiri kehidupan manusia pada tanggal itu. Yang dihitung adalah apa yang dalam matematika disebut *blow-*

up time, yakni titik ketika suatu fungsi dalam model pertumbuhan meningkat tanpa batas jika pola pertumbuhannya terus dipaksakan mengikuti persamaan yang sama.

Terkait Pertumbuhan Populasi

Pada 1960, pertumbuhan penduduk dunia memang sedang berlangsung sangat cepat. Foerster dan dua rekannya menggunakan data populasi selama sekitar dua milenium untuk mencari pola pertumbuhan.

Pada masa sebelumnya, populasi manusia membutuhkan waktu berabad-abad untuk berlipat ganda. Namun, memasuki era modern, waktu tersebut semakin pendek. Berdasarkan kecenderungan itu,

para peneliti membuat model matematis yang mengasumsikan pertumbuhan penduduk akan terus meningkat secara eksponensial dan bahkan semakin cepat.

Model tersebut kemudian menghasilkan titik ekstrem pada 13 November 2026. Jika asumsi yang digunakan benar-benar terus berlaku, populasi manusia akan mendekati kondisi yang secara matematis tidak terbatas. Masalahnya, asumsi tersebut tidak bertahan ketika dibandingkan dengan perkembangan demografi dunia setelah penelitian itu diterbitkan.

Pertumbuhan penduduk global justru melambat secara signifikan. Data yang dikutip CNN Indonesia dari estimasi US Census Bureau menunjukkan tingkat pertumbuhan populasi dunia yang berada di sekitar 2,2 persen pada 1963 telah turun menjadi sekitar 0,84 persen pada 2026. Proyeksi PBB Tunjukkan Perlambatan



Gambaran yang lebih mutakhir juga datang dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam *World Population Prospects 2024*,

PBB memperkirakan populasi dunia memang masih akan bertambah dalam beberapa dekade mendatang, tetapi pertumbuhannya akan mencapai titik puncak sebelum kemudian berbalik menurun.

PBB memperkirakan jumlah penduduk dunia yang mencapai sekitar 8,2 miliar pada 2024 akan meningkat menjadi sekitar 10,3 miliar pada pertengahan 2080-an. Setelah mencapai puncak tersebut, populasi global diproyeksikan perlahan turun menjadi sekitar 10,2 miliar pada 2100. Proyeksi tersebut sekaligus menunjukkan betapa

jauhnya kondisi demografi dunia dari skenario yang digunakan dalam penelitian 1960.

Bahkan, proyeksi terbaru PBB lebih rendah dibandingkan perkiraan yang dibuat satu dekade sebelumnya. Jumlah penduduk dunia pada 2100 kini diperkirakan sekitar 700 juta orang lebih sedikit atau 6 persen lebih rendah dari proyeksi sebelumnya.

Salah satu penyebab utamanya adalah tingkat kelahiran yang menurun di sejumlah negara besar.

PBB mencatat tingkat fertilitas global turun dari sekitar 3,31 kelahiran per perempuan pada 1990 menjadi sekitar 2,25 pada 2024. Perubahan tersebut merupakan bagian dari transisi demografi yang terjadi di berbagai negara. (far,ist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan
TODAY

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, ARIEF SUKAPUTRA, MUHIBUDIN KAMALI

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO I SIDAARJO: TEGUH A I GRESIK: ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) I MOJOKERTO: NUR HIDAYAH I LAMONGAN: L HANDI I BLITAR: ARIEF SUKAPUTRA I KEDIRI: AIS I JOMBANG : SUTONO I PASURUAN-PROBOLINGGO- PONOROGO : IMAN SANTOSO I BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI: PURCAHYONO JULIATMOKO I MADIUN: WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) I MALANG RAYA: SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. I TRENGGALEK: HERLAMBAH I MADURA RAYA: SAHLAN KURNIAWAN I NGAWI: DIMAS RIDHO SURYO BASKORO I DKI JAKARTA: FUAD HASSAN I LOMBOK BARAT: MUHAYYAN I PALANGKA RAYA: NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH I MARKETING COMMUNICATION JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN I SEKERTARIS FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILA DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN, FADHILA I ALAMAT REDAKSI JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26, JL TENGGILIS TENGAH 4 I TELP 03187854491 I PENERBIT PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA I ALAMAT PERCETAKAN SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA I TELP IKLAN 031-87854491 I NIB 91205006801134 I HARGA IKLAN RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Merah dan Hitam, Tampil Stylish Tanpa Berlebihan

Pakaian biasanya dipilih berdasarkan ukuran, bahan, warna, harga, atau apakah modelnya sedang tren. Namun ada satu hal yang jarang masuk pertimbangan: bahan kimia yang digunakan selama proses produksi tekstil.

Sejumlah bahan kimia memang sengaja digunakan agar pakaian memiliki karakter tertentu. Kain bisa dibuat lebih tahan air dan noda, tidak mudah kusut, elastis, awet, atau memiliki warna yang lebih kuat. Persoalannya, sebagian bahan kimia yang digunakan dalam industri tekstil memiliki profil

toksikologi yang membuat penggunaannya terus diawasi.

Isu ini kembali menjadi perhatian setelah Jaksa Agung Texas Ken Paxton pada April 2026 membuka penyelidikan terhadap Lululemon terkait dugaan keberadaan PFAS, kelompok bahan kimia yang dikenal sebagai forever chemicals, dalam produk activewear-nya.

Penyelidikan tersebut bertujuan memeriksa apakah produk Lululemon mengandung PFAS dan apakah konsumen telah mendapat informasi yang memadai mengenai keamanan produknya.

Namun, penting dicatat: penyelidikan tersebut bukan bukti bahwa produk Lululemon terbukti mengandung PFAS atau menyebabkan kanker.

Lululemon sendiri mengatakan kepada Reuters bahwa mereka tidak menggunakan PFAS dalam produknya saat ini dan telah menghentikan penggunaannya sejak tahun fiskal 2023 setelah sebelumnya digunakan secara terbatas pada produk dengan lapisan tahan air.

Kasus tersebut justru membuka pertanyaan yang lebih luas: bahan kimia apa saja yang dapat ditemukan dalam pakaian dan kapan konsumen

perlu mulai memperhatikannya? Berikut empat kelompok bahan yang patut diketahui.

PFAS: Tahan Air dan Noda

PFAS atau per- and polyfluoroalkyl substances merupakan kelompok besar bahan kimia sintesis. Senyawa ini digunakan dalam berbagai produk karena memiliki sifat tahan terhadap air, minyak, dan noda.

Dalam industri tekstil, PFAS dapat digunakan pada material yang membutuhkan sifat water-resistant atau tahan noda. Masalahnya, banyak PFAS sangat sulit terurai. Karena sifat persistensinya, kelompok bahan kimia ini populer disebut forever chemicals. Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat (EPA) mencatat bahwa PFAS dapat ditemukan pada berbagai produk konsumen, termasuk pakaian dan tekstil yang diberi perlakuan agar tahan noda atau air. Paparan terhadap PFAS juga dapat terjadi melalui berbagai sumber, sehingga pakaian hanyalah salah satu kemungkinan jalur paparan.

Risikonya juga tidak dapat disamaratakan karena PFAS terdiri atas ribuan senyawa dengan karakteristik berbeda.

EPA menyebut penelitian pada sejumlah PFAS menemukan kaitan dengan berbagai dampak kesehatan, antara lain gangguan sistem imun, perubahan kadar kolesterol, efek perkembangan dan reproduksi, gangguan hormon, serta peningkatan risiko beberapa jenis kanker pada tingkat paparan tertentu. Namun, tingkat risiko bergantung pada jenis PFAS, dosis, lama dan jalur paparan.

Formaldehida: Tak Mudah Kusut

Pernah membeli pakaian yang tampak sangat rapi meski baru dikeluarkan dari kemasan? Salah satu

teknologi yang digunakan industri tekstil adalah easy-care atau wrinkle-resistant. Dalam proses tertentu, formaldehida atau senyawa yang melepaskannya dapat digunakan untuk memberikan karakter tersebut pada kain. Formaldehida bukan bahan yang hanya berkaitan dengan industri tekstil. Zat ini digunakan dalam berbagai produk dan proses industri, termasuk tekstil, perekat, resin, pelapis, dan sejumlah material rumah tangga.

EPA pada 2025 menyimpulkan formaldehida dapat menimbulkan risiko yang tidak wajar terhadap kesehatan manusia dalam kondisi penggunaan tertentu, termasuk pada konsumen dan pekerja.

Paparan formaldehida juga dikenal dapat mengiritasi kulit dan saluran pernapasan. Pada sebagian orang, kontak dengan bahan yang mengandung atau melepaskan formaldehida dapat memicu dermatitis kontak.

Pewarna Tekstil: Warna Cerah

Pakaian berwarna-warni tentu lebih menarik. Tetapi untuk mendapatkan warna tertentu, produsen membutuhkan berbagai jenis zat pewarna. Salah satu kelompok yang banyak mendapat perhatian adalah pewarna azo.

EPA mencatat pewarna azo merupakan kelompok senyawa organik yang banyak digunakan pada tekstil dan pakaian.

Sebagian jenisnya memiliki bukti potensi mutagenik dan karsinogenik, sehingga karakter masing-masing senyawa perlu dibedakan dan tidak bisa digeneralisasi. Dalam konteks konsumen, perhatian juga tertuju pada kemungkinan munculnya reaksi kulit akibat zat tertentu yang tersisa pada tekstil. (farist/dya)



Detik-detik Terakhir ..dari Hal 1

Purbaya Yudhi Sadewa masih menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan ketika sebuah telepon masuk di tengah agenda rapat di kompleks parlemen, Senin (14/9/2026).

Hari itu, Purbaya menghadiri rapat kerja Komite IV DPD RI. Agenda yang dibahas berkaitan dengan kondisi fiskal dan RAPBN 2027. Ia masih duduk di ruang rapat ketika menerima panggilan telepon.

Dalam rekaman yang beredar, Purbaya terdengar menyapa telepon dengan panggilan "Pak".

"Halo Pak. Iya, siap-siap. Saya masih di DPD, Pak," ujar Purbaya dalam percakapan tersebut.

Tak lama setelah menerima telepon, Purbaya meninggalkan gedung DPD.

Tidak diketahui secara pasti siapa penelepon tersebut dan apa isi lengkap pembicaraan mereka. Yang terkonfirmasi, setelah Purbaya meninggalkan agenda di DPD, pemerintah pada hari yang sama mengumumkan pergantian Menteri Keuangan.

Beberapa jam kemudian, Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara.

Pergantian itu menutup masa jabatan Purbaya sebagai bendahara negara setelah sekitar satu tahun menduduki posisi tersebut.

Di sisi lain, ketika Purbaya masih mengikuti pembahasan RAPBN di DPD, orang yang akan menggantikannya pun mengaku baru mengetahui penunjukan itu pada hari yang sama.

Suahasil mengatakan dirinya mendapat telepon dari Istana pada Senin (14/9/2026) pagi. Setelah itu, ia diminta bersiap untuk menjalani pelantikan.

"Pagi tadi saya ditelepon, kemudian disampaikan untuk bersiap," kata Suahasil setelah pelantikan.

Ia bahkan mengaku belum berkomunikasi dengan Purbaya pada hari pergantian tersebut.

"Enggak ada. Hari ini enggak ada," ujar Suahasil ketika ditanya apakah telah berkomunikasi dengan Purbaya.

Pemerintah menetapkan pergantian itu melalui Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih untuk sisa masa jabatan 2024–2029.

Istana belum menjelaskan secara spesifik alasan Presiden Prabowo memberhentikan Purbaya.

Diketahui, Purbaya masuk ke kabinet pada September 2025 menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

Ia dikenal membawa pendekatan yang lebih agresif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sejumlah kebijakan pada masa kepemimpinannya kemudian menjadi sorotan, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan likuiditas dan upaya mendorong aktivitas ekonomi.

Defisit Tetap di Bawah 3%

Dengan pengalaman panjang di institusi fiskal tersebut, Suahasil memahami secara langsung bagaimana mesin APBN bekerja.

Setelah dilantik, pesan pertamanya juga sangat jelas: menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara.

"Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut," kata Suahasil.

Menurut dia, APBN harus tetap mampu membiayai program prioritas pemerintah tanpa mengorbankan kesehatan fiskal.

"APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya," ujarnya.

Suahasil juga memastikan pemerintah tetap menjaga defisit APBN di bawah batas 3 persen.

"Defisit akan tetap di bawah 3 persen," katanya

Menariknya, Suahasil tidak menggambarkan kedatangannya sebagai awal dari perubahan besar di Kementerian Keuangan.

Ia justru menyebut pergantian dirinya dengan Purbaya sebagai kelanjutan pekerjaan yang sudah berjalan.

"Menurut saya ini bukan perubahan, ini adalah kelanjutan saja, bukan perubahan, kelanjutan," kata Suahasil.

Pasar Bereaksi

Pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara langsung mendapat perhatian pelaku pasar pada perdagangan Senin (14/9/2026). Respons awal terlihat dari tekanan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang sempat jatuh lebih dari 2 persen sebelum berbalik menguat setelah kepastian Suahasil sebagai Menkeu baru.

IHSG sempat menyentuh level terendah 6.371,39. Namun, menjelang penutupan, indeks berhasil memangkas pelemahan dan kembali ke kisaran 6.500. IHSG akhirnya ditutup pada level

6.534,75, turun 0,10 persen dibandingkan perdagangan sebelumnya. Sepanjang sesi, indeks bergerak di rentang 6.371 hingga 6.550.

Pembalikan arah terjadi bersamaan dengan kepastian Suahasil Nazara dilantik menggantikan Purbaya. Sejumlah analis menilai pasar merespons positif sosok Suahasil yang memiliki pengalaman panjang di Kementerian Keuangan. Saham-saham berkapitalisasi besar ikut menguat; data Stockbit mencatat saham empat bank besar naik sekitar 2–4 persen, sementara IHSG mampu menutup perdagangan hanya dengan koreksi tipis..

Namun, respons positif di pasar saham belum sepenuhnya tercermin pada rupiah. Nilai tukar rupiah ditutup melemah 58 poin atau 0,33 persen ke Rp17.669 per dolar AS, dari posisi sebelumnya Rp17.611. Pada perdagangan hari itu, rupiah bergerak di tengah tekanan dolar AS dan perhatian pasar terhadap perubahan mendadak di Kementerian Keuangan.

Pergerakan tersebut menunjukkan pasar sempat menganggap pergantian Menkeu sebagai sumber ketidakpastian, tetapi mulai merespons lebih tenang setelah sosok pengganti dipastikan.

Analisis melihat latar belakang Suahasil sebagai teknokrat Kementerian Keuangan dapat memberikan sinyal kontinuitas sekaligus membantu meredakan kekhawatiran mengenai arah kebijakan fiskal.

Pengamat ekonomi Josua Pardede menilai tantangan pertama datang dari situasi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian. Salah satu persoalan yang perlu diantisipasi adalah kenaikan harga minyak mentah dunia akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Menurut dia, kondisi itu berpotensi meningkatkan beban impor bahan bakar minyak (BBM) dan pada akhirnya memberi tekanan terhadap postur fiskal Indonesia.

"Dampak dari kenaikan harga minyak mentah ini akan sangat terasa pada postur fiskal kita, terutama terkait dengan membengkaknya biaya impor BBM. Hal ini menjadi PR yang sangat penting untuk segera diantisipasi oleh Menteri Keuangan sebagai pengelola kas negara," ujar Josua, Senin (14/9/2026).

Tantangan lain berada di dalam negeri. Josua menilai Suahasil harus menjaga keseimbangan antara disiplin fiskal dan kebutuhan mendorong pertumbuhan ekonomi. Persoalan itu semakin kompleks ketika kebijakan perpajakan, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), beririsan langsung dengan daya beli masyarakat.

"Ini bukan pekerjaan yang mudah bagi siapa pun Menteri Keuangannya, apalagi jika kita bicara di era PPN ini. Belanja pemerintah harus bisa lebih produktif agar memberikan dampak riil, khususnya untuk mendongkrak daya beli masyarakat yang belakangan ini kita rasakan cenderung mengalami penurunan," kata Josua.

Dari parlemen, Wakil Ketua Komisi XI DPR Fauzi Amro menilai Suahasil merupakan sosok yang tepat untuk mengisi kursi Menteri Keuangan. Menurut Fauzi, pergantian menteri merupakan hak prerogatif presiden untuk menilai kinerja, kapasitas, dan kapabilitas anggota kabinet.

"Ya sebagai Wakil Ketua Komisi XI pertama, bahwa pergantian menteri itu merupakan hak prerogatif daripada presiden. Nah presiden yang bisa menilai secara objektif terhadap kinerja, terhadap kapasitas, kapabilitas seseorang layak dan tidak layak dalam menghadapi situasi perekonomian di kita," kata Fauzi kepada kumparan, Senin (14/9/2026).

Sebagai mitra kerja Kementerian Keuangan, Fauzi berharap Suahasil mampu menjadi solusi terhadap persoalan fiskal dan ekonomi. Ia menyoroti tekanan global dan dinamika ekonomi domestik, termasuk bagaimana pemerintah meningkatkan pendapatan, memastikan belanja negara berkualitas, serta menjalankan transfer ke daerah.

"Yang kita menghadapi tekanan global yang sangat luar biasa, menghadapi dinamika perekonomian kita yang sangat luar biasa, secara mikro bagaimana pendapatan negara kita bagaimana belanja negara kita, yang berkualitas, bagaimana transfer daerah kita. Itu kan bagian yang tidak terpisahkan kerja kerja menteri keuangan," ujarnya.

Fauzi juga meminta Suahasil melanjutkan sejumlah pekerjaan rumah yang telah dikerjakan Purbaya. Menurut dia, penerimaan negara harus dimaksimalkan melalui pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Di sisi belanja, pemerintah harus memastikan anggaran digunakan secara berkualitas dan adil, sementara persoalan transfer ke daerah juga perlu ditangani.

"Nah kami berharap Menteri Keuangan ini Pak Suahasil Nazara ini bisa memberikan solusi dari PR-PR yang ditinggalkan oleh Pak Purbaya selama ini. Bagaimana pendapatan negara harus dimaksimalkan, bagaimana itu pajak, bea cukai PNBP, bagaimana belanja negara yang berkualitas dan adil bagi semua orang, bagaimana transfer daerah yang hari ini banyak dilakukan penolakan," kata Fauzi. (wid, ant, rls, ist, kum/dya)

Update Tragedi Maritim Indonesia

5 JURNALIS DI SELAT SUNDA DAN 129 PENUMPANG VIRGO MASIH DICARI

Tujuh hari pencarian di Selat Sunda belum membuahkan hasil. Basarnas memperpanjang operasi pencarian lima jurnalis dan tiga awak speedboat Arupadhatu 1 selama tiga hari. Di sisi lain, hari kedua pencarian KMP Virgo Transport 8 memasuki tahap baru setelah titik kapal berhasil ditentukan. Tim SAR menyiapkan penyelaman di Laut Jawa untuk mencari korban yang kemungkinan masih berada di dalam atau sekitar badan kapal.



Prajurit TNI AL awak KRI Lepu-861 melakukan pencarian kapal cepat yang hilang kontak di Perairan Selat Sunda, Banten, Senin (14/9/2026). (ant.ist)

Tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian terhadap lima jurnalis dan tiga awak kapal cepat Arupadhatu 1 yang hilang kontak di perairan Selat Sunda, Banten. Setelah tujuh hari pencarian belum menemukan keberadaan mereka, operasi akan dilanjutkan selama tiga hari ke depan.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten Al Amrad mengatakan hasil evaluasi operasi hingga hari ketujuh masih nihil. Keputusan memperpanjang pencarian disampaikan setelah rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Banten pada Senin (14/9/2026).

"Hasil evaluasi hasil operasi SAR yang hari ke-7 pada hari ini, yang kita laksanakan hingga saat ini masih nihil. Dan hasil rapat koordinasi tadi yang disampaikan Pak Gubernur, kita akan lanjutkan pencarian selama tiga hari ke depan," kata Al Amrad di Posko Pencarian Pantai Marina Carita.

Pencarian dilakukan dengan memperluas area operasi. Tim SAR bahkan mendekati kawasan Gunung Anak Krakatau hingga radius sekitar tiga kilometer. Langkah itu dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana

Geologi (PVMBG) mengenai kondisi aktivitas gunung.

"Dan tim kami tetap siap sampai dengan hal terburuk yang harus kita lakukan. Seperti kemarin, sampai dengan Gunung Anak Krakatau kita sudah mendekat memasuki radius 3 km berdasarkan hasil koordinasi kami dari rekan-rekan PVMBG bahwa pada saat itu tidak ada erupsi, kami mencoba masuk sampai ke sana," ujar Al Amrad.

Pada hari keenam dan ketujuh, penyisiran juga diperluas hingga wilayah Samudra Hindia. Basarnas menggunakan pemodelan pergerakan arus dan kemungkinan pergeseran target untuk menentukan area pencarian. Tim bahkan telah memperluas pencarian hingga perairan Bengkulu.

Pada Senin, operasi melibatkan sekitar 18 kapal dan satu helikopter. Pencarian dibagi ke sejumlah sektor laut dan udara, sementara jalur darat di sepanjang pesisir Carita hingga Anyer turut diantisipasi. Penyisiran juga dilakukan di sekitar Pulau Sertung, Pulau Rakata Besar, dan Pulau Panjang.

Kondisi cuaca masih menjadi salah satu kendala. Berdasarkan informasi BMKG, cuaca pada Senin relatif

berawan dengan angin sekitar 5-20 knot dari arah tenggara. Tinggi gelombang berkisar 0,5-2,5 meter dengan arah pergerakan gelombang menuju timur laut. Aktivitas Gunung Anak Krakatau sendiri masih berstatus Level III atau Siaga, meski belum terdapat tanda erupsi kembali.

Lima jurnalis dalam rombongan itu adalah M. Bagus Khoirunnas dari LKBN Antara, Ari Basuki dari Merdeka, Yudhistiro Pranoto dari iNews, Firman Daus dari Anadolu Agency, serta Donal Husni yang merupakan jurnalis lepas. Tiga orang lainnya adalah Warta sebagai nakhoda, Surakman sebagai ABK, dan Heriyanto sebagai pemandu.

Basarnas Siapkan Operasi Bawah Laut Jawa

Sementara Tim SAR gabungan untuk KMP Virgo Transport 8 mempersempit wilayah pencarian korban usai posisi kapal yang terbalik di Laut Jawa berhasil ditentukan. Dari total 243 orang dalam manifes, hingga Senin (14/9/2026) sebanyak 114 orang telah ditemukan, terdiri atas 108 orang selamat dan enam meninggal dunia. Sebanyak 129 orang lainnya masih dalam pencarian.

Kepala Basarnas Mohammad Syafii mengatakan wilayah operasi yang sebelumnya dibagi menjadi delapan sektor kini dipersempit menjadi enam sektor. Fokus pencarian diarahkan ke titik kapal dan wilayah di sekitarnya yang diperkirakan memungkinkan terdapat korban.

Basarnas juga menyiapkan operasi bawah laut dengan melibatkan KRI Canopus-936 milik TNI Angkatan Laut. Sejumlah penyelam dari Basarnas, Basarnas Special Group, Kopaska TNI AL, serta unsur penyelam lainnya akan dikerahkan.

"Beberapa personel yang akan kita terjunkan, mulai dari Basarnas sendiri, Basarnas Special Group, kemudian kita mengerahkan dari Kopaska TNI AL dan juga teman-teman penyelam yang akan kita siapkan," kata Syafii di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin, Senin.

Namun, penyelaman belum dapat dilakukan sebelum kondisi laut dinilai aman. Gelombang tinggi dan angin kencang masih menjadi pertimbangan utama untuk melindungi keselamatan penyelam.

"Kita mengharapkan adanya safety. Artinya mudah-mudahan cuaca bagus sehingga memungkinkan untuk kita laksanakan operasi underwater," ujar Syafii.

Pencarian udara dan permukaan laut tetap berjalan. Pada hari kedua, Basarnas mengerahkan lima pesawat dari unsur Basarnas, Polri, TNI AL, dan BNPB. Sejumlah kapal juga disebar di enam sektor pencarian. Reuters melaporkan lebih dari 600 personel, 17 kapal, dan lima helikopter atau pesawat dilibatkan dalam operasi pencarian. (tin, ant, rls/dya)



Petugas gabungan memindahkan kantong jenazah korban Kapal Motor Penumpang (KMP) Virgo Transport 8 dari helikopter ke mobil untuk dibawa ke RS Bhayangkara di Lanud Samsudin Noor, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (14/9/2026). (ant.ist)